



**KEBERHASILAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
DALAM PENETAPAN YOGYAKARTA
SEBAGAI ASEAN CITY OF CULTURE KE 5 TAHUN 2018-2020**

**THE SUCCESS OF COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT IN
DETERMINING YOGYAKARTA
AS THE 5th ASEAN CITY OF CULTURE 2018-2020**

Diansari Solihah Amini^{1*}, Tanti Nurgiyanti²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi,
Universitas Respati Yogyakarta

^{1*}dian_amini@respati.ac.id, ²tanti.nurgiyanti@respati.ac.id

***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas tentang pencapaian Yogyakarta yang ditetapkan sebagai Kota Kebudayaan ASEAN (*ASEAN City of Culture*) ke-5, periode 2018 hingga 2020 oleh Menteri ASEAN Bidang Kebudayaan dan Kesenian (*ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts/AMCA*) dalam pertemuan AMCA yang ke-8 di Yogyakarta. Hal ini tentu membuktikan bahwa Yogyakarta mampu menunjukkan jati dirinya sebagai kota ber-identitas ASEAN yang menjunjung tinggi kemajemukan, inklusifitas, keamanan dan perdamaian yang tercermin melalui nilai-nilai keberagaman sosial yang tercipta dari berbagai kebudayaan yang ada di kota tersebut. Pencapaian ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pembangunan manusia di Yogyakarta yang menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Dengan menggunakan konsep pembangunan berbasis masyarakat, penelitian ini akan melihat bahwa kebudayaan memegang peran penting sebagai dasar bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Kata kunci : kebudayaan, pembangunan berbasis masyarakat, *city of culture*

ABSTRACT

This paper will discuss the achievements of Yogyakarta being determine as the 5th ASEAN City of Culture, for the period 2018 to 2020 by the ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA) at the 8th AMCA meeting in Yogyakarta. This certainly proves that Yogyakarta is able to show its identity as a city with an ASEAN identity that upholds pluralism, inclusiveness, security and peace which is reflected through the values of social diversity created from various cultures in the city. This achievement certainly cannot be separated from the success of human development in Yogyakarta which created a empowered and cultured society. By using the concept of community-based development, this study will see that culture plays an important role as the basis for complete human development.

Keywords: culture, community-based development, *city of culture*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan melalui teori modernisasi menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa melihat aspek-aspek sosial sebagai pendukung adanya pembangunan. Melalui teori modernisasi aspek kultural dianggap sebagai rintangan (*weerstand*) untuk proses modernisasi, namun pandangan polaritas masyarakat tradisional dan modern dikritisi kembali oleh berbagai kalangan ilmu sosial. Masyarakat yang disebut *modern* pun dalam kenyataannya adalah tradisional dan modern. Dengan demikian bukan tradisi saja yang berdampingan dengan modernitas, tetapi juga modernisasi dapat memperkuat tradisi. Kebudayaan adalah penjelmaan manusia dalam penghadapannya dengan lingkungan alam dan sosialnya dengan ruang dimana ia hidup dan dalam penghadapannya dengan waktu, peluang dan pilihan, berkesinambungan dan perubahan, dengan sejarah. Kebudayaan memiliki daya-daya yang berlawanan: daya penentang perubahan, yang diperlukannya untuk mempertahankan keutuhannya sendiri, dan daya kearah perubahan, yang diperlukannya dalam penyesuaian terhadap masalah-masalah baru. Makin kuat integrasi kebudayaan, makin kuat pula daya penentang perubahan. Sebaliknya, makin lemah integrasi kebudayaan, makin kuat pula daya ke arah perubahan. Kebudayaan merupakan unsur yang mendasari pembangunan manusia dalam segala aspeknya. Melalui kebudayaan, jati diri manusia terbenuk, demikian juga karakter dan sifat yang mencerminkan keluhuran budi dan daya yang tercipta dari manusia, baik sebagai pengguna maupun sebagai pencipta kebudayaan itu sendiri. Pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan hal – hal yang bersifat materi saja, akan tetapi berkaitan juga dengan hal – hal yang bersifat non materi seperti nilai sosial, lingkungan, pola pikir dan lain-lain.[1,xxii]

Pembangunan manusia juga menyentuh ranah yang paling mendasar dari relasi antar manusia yang tertuang dalam suatu bentuk kebudayaan. Adat dan tradisi yang melanggengkan kebudayaan juga turut dimaknai sebagai warisan budaya dari leluhur, semakin terlihat jelas di dalam kehidupan sehari – hari masyarakat yang kental budaya, termasuk Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota dengan berbagai macam budaya majemuk, yang dihargai keberagamannya tanpa mengabaikan unsur – unsur modernitas yang hadir mewarnai kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Meskipun modernisasi terjadi di Yogyakarta, tidak melunturkan kecintaan dan toleransi pada budaya lokal. Beragamnya kreatifitas dan tokoh budaya yang produktif di kota ini menjadikan *image* positif bagi Yogyakarta sebagai kota budaya yang majemuk, inklusif, aman dan damai tanpa kekhawatiran terhadap intoleransi. Keragaman budaya yang tercipta di Yogyakarta tidak lantas mematikan salah satu kebudayaan lokal, tetapi justru menumbuhkan ragam kebudayaan baru yang saling mengisi satu sama lain.

Predikat Yogyakarta sebagai kota budaya yang terkenal hingga mancanegara tentunya memberikan dampak positif bagi Yogyakarta. Salah satunya, Yogyakarta adalah Propinsi di Indonesia yang mendapat predikat sebagai *Asean City of Culture*, dimana kota ini diharapkan dapat mengarusutamakan budaya pencegahan, menanamkan nilai-nilai yang menjadi kesamaan antara negara anggota ASEAN, seperti perdamaian, kerukunan, kesepahaman antar-budaya, supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, saling menghormati, saling percaya, toleransi, inklusifitas, kesederhanaan, tanggungjawab sosial dan keberagaman.

Gerakan ASEAN *City of Culture* ini dimulai sejak 2008 dan bertujuan untuk memperkuat identitas ASEAN dan meningkatkan keunggulan ASEAN di dalam dan di luar kawasan dengan merayakan seni dan budaya Asia Tenggara. Sebuah negara akan ditetapkan sebagai Kota Kebudayaan ASEAN selama dua tahun berturut-turut. Selama waktu ini, negara tersebut berkesempatan untuk menampilkan warisan budaya terbaiknya.[2]

2. KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Kebudayaan

Pemahaman terhadap kebudayaan meliputi pengertian “sempit” dan “luas.” Dalam pengertian “sempit,” kebudayaan dipahami sebagai “kesenian,” sehingga seniman dianggap sebagai budayawan, pementasan kesenian sering disebut sebagai acara budaya, misi kesenian yang melawat ke luar negeri sering dikatakan sebagai misi kebudayaan. Pandangan dan 6 praktek demikian tentu mempersempit pengertian kebudayaan, terutama ditinjau dari unsur-unsur atau isi kebudayaan sebagai strategi perluasan kebudayaan. Pengertian demikian tidak sepenuhnya keliru karena kesenian pun merupakan unsur kebudayaan yang penting. Sosiolog Inggris terkemuka, Anthony Giddens mengenai kebudayaan dalam hubungannya dengan masyarakat menerangkan sebagai berikut. *When we use the term in ordinary daily conversation, we often think of „culture” as equivalent to the „higher things of the mind” – art, literature, music and painting... the concept includes such activities, but also far more. Culture refers to the whole way of life of the members of a society. It includes how they dress, their marriage customs and family life, their patterns of work, religious ceremonies and leisure pursuits. It covers also the goods they create and which become meaningful for them – bows and arrows, ploughs, factories and machines, computers, books, dwellings.* (Ketika kita menggunakan istilah tersebut dalam percakapan biasa sehari-hari, kita sering berpikir tentang „kebudayaan” sama dengan „karya-karya akal yang lebih tinggi” – seni, sastra, musik dan lukisan.... konsepnya meliputi kegiatan-kegiatan tersebut, tapi juga jauh lebih banyak dari itu.

Kebudayaan berkenaan dengan keseluruhan cara hidup anggota-anggota masyarakat. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka – busur dan anak panah, bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman).[3]

2.2 Konsep “pembangunan berpusat pada manusia” (*people-centered development*)

Memposisikan tujuan utama dan terutama pembangunan adalah membantu segenap umat manusia (warga negara) menggapai kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidupnya. Gagasan paradigma pembangunan ini pertama-tama mengemuka dalam laporan tahunan *United Nations Development Programme* (UNDP) yaitu *The Human Development Report* yang diterbitkan pada tahun 1990. Secara tegas, laporan itu menunjukkan bahwa derajat atau tingkat pembangunan negara-negara diukur berdasarkan indeks pembangunan manusianya. Dalam perjalanannya, konsep tersebut didorong dan diajukan pada KTT Dunia Pembangunan Sosial (*World Summit for Social Development*) pada tahun 1995 dan serangkaian konferensi internasional yang berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan di beberapa tahun setelahnya. “Pembangunan berpusat pada manusia” (*people-centered development*) akhirnya pun menjadi tema sentral dalam berbagai diskusi isu pembangunan di lingkup komunitas internasional pada tahun 1990an. Laporan Pembangunan Manusia UNDP (*The Human Development Report of the UNDP*) memperkenalkan konsep tersebut di Tokyo tahun 1996, yang secara mendasar memusatkan perhatian pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang sebenarnya hendak didesakkan UNDP adalah bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan sedangkan pertumbuhan ekonomi sekadar sebagai alat/sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bila dikalimatkan kembali dengan bertitik tolak pada keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi (*sustainability of economic growth*), demikian

laporan itu menegaskan, *“Short-term advances in human development are possible – but they will not be sustainable without further growth. Conversely, economic growth is not sustainable without human development.”* Dalam translasi, ungkapan tersebut berbunyi: “Dalam jangka pendek, keuntungan-keuntungan dalam pembangunan manusia itu mungkin—tetapi itu tidak akan berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan yang lebih jauh. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa pembangunan manusia.” Apa yang ditekankan dalam penjelasan tersebut bahwa gagasan besar dari “pembangunan berpusat pada manusia” (*people-centered development*) bukan berarti menegasikan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, laporan UNDP itu menekankan tentang pentingnya pertumbuhan ekonomi bagi pembangunan yang berkelanjutan dalam makna pengertian sebenarnya. Kepedulian utama yang terkandung dalam gagasan “pembangunan yang berpusat pada manusia” adalah ada tidaknya keuntungan kue ekonomi yang meningkat oleh pertumbuhan ekonomi akan menyalurkannya pada individu-individu berupa peningkatan tenaga kerja dan pendapatan. Kepentingannya juga terletak pada ada tidaknya individu-individu akan dimungkinkan untuk ikut serta dalam proses pembangunan seturut kapasitas mereka masing-masing. Dengan kata lain, paradigma “Pembangunan yang Berpusat pada Manusia” ini menekankan tentang pentingnya peningkatan kapasitas manusia sebagai fokus utamanya[4,283-300].

2.3 Korten : konsep pembangunan berpusat pada manusia

Memandang inisiatif kreatif dari manusia sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan. Lebih jauh, Korten mengemukakan tiga tema pokok yang dianggap menentukan bagi konsep perencanaan yang berpusat pada manusia, yaitu:

- a. Penekanan akan dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri;
- b. Kesadaran bahwa walaupun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagai besar rumah tangga miskin;
- c. Kebutuhan akan kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

Dalam konteks tiga tema pokok Korten tersebut, manusia dan lingkungan merupakan variabel endogen yang utama, yaitu sebagai titik tolak bagi perencanaan pembangunan, sehingga perspektif dasar dan metode analisis dalam pendekatan pembangunan ini yaitu Ekologi Manusia yaitu kajian mengenai interaksi antara sistem manusia dan ekosistem. Pendekatan ini juga mempersoalkan dua asumsi yang terkandung dalam model-model pembangunan ekonomi; pertama, bahwa pembangunan dengan sendirinya membantu setiap orang, dan kedua, bahwa masyarakat ingin diintegrasikan dalam arus utama suatu pembangunan model barat, dimana mereka tidak punya pilihan untuk merumuskan jenis masyarakat yang mereka inginkan.[5]

3. PEMBAHASAN

3.1 Yogyakarta sebagai ASEAN City of Culture

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan Yogyakarta sebagai *ASEAN City of Culture* dalam pertemuan tingkat Menteri Pendidikan se-ASEAN pada Oktober 2018. Usulan ini diajukan karena Yogyakarta menjadi dianggap sebagai kota yang paling logis menjadi salah satu ibukota kebudayaan di ASEAN. Bagi Kemedikbud sendiri pengusulan Yogyakarta pun sudah

bulat. Pertimbangannya karena Yogyakarta memiliki sejarah untuk waktu yang sangat lama. Apalagi Yogyakarta juga menjadi kota dengan tingkat kepadatan kebudayaan yang tertinggi di Indonesia. Dalam segi kegiatan kebudayaan seperti festival pun di Yogyakarta sangat banyak dalam setahun. Pada kunjungan tersebut juga disampaikan rangkaian cara terkait pertemuan Menteri Pendidikan tingkat ASEAN dan Gubernur DIY telah mendukung terlaksananya kegiatan ini [6]. Secara resmi pengukuhan status sebagai Kota Budaya ASEAN tersebut dilakukan dalam pertemuan tingkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan se-ASEAN pada bulan Oktober 2018. Kemendikbud memilih Yogyakarta diantara kota yang lain karena memiliki sejarah kebudayaan yang panjang dan memiliki tingkat kepadatan intelektual yang tertinggi di Indonesia. Pendirian Kota Budaya ASEAN merupakan program bersama Kementerian Kebudayaan negara-negara ASEAN dan penetapan kota yang berubah setiap dua tahun sekali.

“Sejarah Yogyakarta dengan tingkat kepadatan intelektual dan kebudayaan yang tertinggi di Indonesia, bahkan dalam satu tahun, lebih dari 100 festival digelar di Yogyakarta, maka masuk akal jika Yogyakarta ditetapkan sebagai *City of Culture ASEAN*,” ungkap Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid usai bertemu Gubernur DIY di Gedhong Wilis, Kepatihan Yogyakarta. Menurut Hilmar, setiap dua tahun sekali ASEAN menetapkan satu kota menjadi *city of culture*. Lokasi yang ditempati untuk pertemuan tingkat menteri itulah yang menjadi *city of culture*. Tahun ini di bawah kepemimpinan Indonesia, pemerintah telah menunjuk satu kota dan Yogyakarta adalah pilihan yang sangat logis dan layak menjadi ibukota budaya di ASEAN.[7] Penetapan tersebut dilakukan pada Rabu, 24 Oktober di Teater Terbuka Candi Prambanan, Yogyakarta. Penetapan ini sejalan dengan Yogyakarta sebagai tempat berlangsungnya pertemuan tingkat menteri bidang kebudayaan ASEAN ke-8 dan Pertemuan Pejabat Senior ASEAN bidang Kebudayaan ASEAN ke-14. Pertemuan dua tahunan ini dilaksanakan pada 21 hingga 26 Oktober 2018. Setahun sebelum Yogyakarta terpilih, kota budaya ASEAN adalah Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Yogyakarta merupakan kota kelima yang dipilih sebagai Kota Budaya. Pada pertemuan tersebut, para delegasi menyambut baik tekad tersebut. Untuk menandai penunjukan ini, Yogyakarta menyelenggarakan festival seni ASEAN pada Rabu 24 Oktober 2018 yang menampilkan seniman dari negara-negara ASEAN dan 3 mitra wicara. Festival ini adalah contoh bagaimana ASEAN merayakan keragaman budaya, menggunakan budaya untuk memajukan tradisi dan warisan, serta membina persahabatan yang telah terjalin lama antara negara-negara ASEAN dan mitra wicara mereka.[8]

Setelah menyandang sebagai Kota Budaya ASEAN, program-program terkait kebudayaan di Yogyakarta akan terus ditingkatkan, seperti pelestarian kebudayaan benda dan tak benda, budaya sehat dan lain-lain. Terpilihnya Yogyakarta sebagai Kota Budaya ASEAN, akan semakin memperkokoh Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Predikat *City of Culture* mendatangkan konsekuensi tersendiri, misalnya wajib menyusun rencana kerja yang memuat tema besar *Culture of Prevention* atau budaya mencegah hal buruk. Konsekuensi tersebut harus disampaikan kepada seluruh negara peserta, termasuk Korea, Jepang dan China. Setiap kegiatan harus melibatkan prinsip budaya untuk mencegah hal buruk dan hal tersebut merupakan prioritas. Ananto Kusuma Seta, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan Yogyakarta sangat layak mendapatkan predikat *City of Culture* karena masyarakat hidup harmonis meski sangat heterogen.[9]

Kemudian tindak lanjut pengukuhan Yogyakarta sebagai Kota Budaya ASEAN dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama komunitas seniman-seniman muda Jogja dengan menyusun Program Jogja Budaya. Program ini sejatinya adalah sebuah gerakan berbasis budaya dan mengusung pula semangat Gandeng Gendong yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota



Yogyakarta. Gandeng Gendong adalah perwujudan filosofi gotong royong berbagai elemen masyarakat yang terbagi menjadi 5 K: Kota, Kampung, Kampus, Komunitas dan Korporat. Khususnya bagi Yogyakarta, elemen ini ditambah dengan satu lagi elemen yang sakral yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebuah pilot project gerakan budaya hasil *partnership* antara komunitas para budayawan dan seniman muda Jogja dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Gerakan Budaya yang dinamakan *Jogja Cross Culture* ini berlangsung 3-4 Agustus 2019 di titik 0 Kilometer, Yogyakarta.

Program ini kemudian mulai diperkenalkan pada elemen masyarakat lainnya. Pada elemen Kampung, 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta bergabung dan terlibat langsung di beberapa rangkaian acara, seperti pembuatan Jenang Khas Kota Yogyakarta yang diberi nama Jenang Golong Gilig, yang diperkenalkan di acara tersebut. Perwakilan wilayah ini terlibat pula dalam penampilan tari rakyat yang juga digelar tepat di Titik 0 Kilometer Jogjakarta secara bersama-sama dengan kolaborasi penampilan dalam Njoged Njalar. Keterlibatan lain dari perwakilan wilayah ini terdapat pula aktivitas yang mengedepankan edukasi sejarah, dikemas dalam tajuk Historical Trail Njeron Benteng. Aktivitas yang terbuka juga untuk umum ini mengajak pesertanya menyusuri tempat-tempat bersejarah Njeron Benteng. Konsep partisipatif ini menjadi penting bagi sebuah gerakan budaya, seperti yang disampaikan Budayawan Prof. Dr. Suminto A. Sayuti, “*Cross Culture* itu mungkin selalu kontekstual tetapi prinsipnya itu pelibatan. Melibatkan banyak pihak sehingga silang budaya memunculkan pemahaman lintas budaya.” Keterlibatan Kampus pun diusung sebagai ruang persiapan *Cross Culture Performance*. Rangkaian acara di tanggal 4 Agustus 2019 juga diisi dengan pengenalan program Gandes Luwes dari pemerintah Kota Yogyakarta.

Puncaknya adalah *Historical Orchestra* dan *Cross Culture Performance* yang mengharmonisasikan karawitan, musik orchestra, choir, dan seniman-seniman Yogyakarta yang berkolaborasi dengan seniman internasional di satu panggung. Representasi akar budaya Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang dihadirkan lewat Tepas Keprajuritan akan berpartisipasi juga di *Cross Culture Performance*. Elemen Komunitas juga banyak berpartisipasi pada program ini, selain komunitas seni musik, tari, visual, juga bergabung pada program ini komunitas permainan tradisional, multimedia, dan forum-forum masyarakat online Yogyakarta. Komunitas-komunitas ini mewakili budaya tradisi juga budaya kekinian. Lintas budaya juga dipresentasikan pada tanggal 3 Agustus 2019 dalam penampilan Wayang Kota. Ini merupakan kolaborasi Wayang Ukur yang diperkenalkan oleh Maestro Wayang Sigit Sukasman dengan lima dalang generasi milenial. Pada kesempatan ini, mereka menampilkan lakon Kancing Jaya.

Selain *Jogja Cross Culture*, terdapat pula acara budaya lain yang diselenggarakan pasca penetapan Yogyakarta sebagai *ASEAN City of Culture* kelima pada tahun 2018 tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan sebuah perhelatan akbar bertajuk *ASEAN Contemporary Dance Festival (ACDF)* sebagai ajang unjuk pertunjukan dan dialog mengenai dunia tari kontemporer tingkat regional pada tanggal 9-15 Juli 2019 di kota Yogyakarta. Acara ini melibatkan 10 delegasi negara ASEAN, antara lain yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Pemilihan Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan acara karena memiliki jejak sejarah panjang dan kontribusi berkesinambungan dalam penciptaan dan pengembangan kebudayaan, tidak hanya bagi Indonesia namun juga secara kawasan. Terlebih lagi, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Kota Budaya ASEAN untuk periode tahun 2018 hingga 2020 pada Sidang Menteri-menteri Kebudayaan se-ASEAN ke-8 tahun 2018. Sejumlah venue di Yogyakarta dipilih

sebagai tempat pelaksanaan, antara lain adalah Auditorium Driyarkara Universitas Sanata Dharma dan Padepokan Seni Bagong Kussudiardja.

3.2 Kebudayaan sebagai Dasar bagi Pembangunan Manusia Berbasis Masyarakat

Sebagai kota budaya yang telah dikenal di seluruh dunia, bukanlah hal yang mengherankan jika Yogyakarta terpilih menjadi *ASEAN City of Culture* kelima yang diselenggarakan Asean pada tahun 2018. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri se-ASEAN, sudah menjadi hal yang wajar jika Indonesia memilih Yogyakarta sebagai kota penyelenggara rangkaian acara tersebut dengan tujuan untuk menampilkan kematangan budaya yang telah mengakar kuat di kota ini. Bukan hanya kebudayaan yang bersifat *tangible* akan tetapi juga *intangible* yang menjadi pertimbangan pengusulan Yogyakarta sebagai *ASEAN City of Culture*. [10]

Yogyakarta merupakan kota yang tumbuh dan berkembang dari budayanya. Toleransi budaya di kota ini sangatlah tinggi, maka tidak heran jika terdapat beragam kolaborasi kebudayaan yang lahir dari Yogyakarta dan memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan merupakan unsur yang mendasari pembangunan manusia dalam segala aspeknya. Melalui kebudayaan, jati diri manusia terbentuk, demikian juga karakter dan sifat yang mencerminkan keluhuran budi dan daya yang tercipta dari manusia, baik sebagai pengguna maupun sebagai pencipta kebudayaan itu sendiri.

Salah satu hal yang patut untuk dipertimbangkan dan dijadikan sebagai pijakan adalah mengenai pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan berbasis masyarakat merupakan konsep yang menegaskan bahwa untuk membangun manusia seutuhnya maka diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat itu sendiri. Peran serta dari masyarakat tentunya erat berkaitan dengan penerimaan dan pengakuan kebudayaan lokal dari komunitas yang telah dibina dan dipelihara dalam kurun waktu yang lama. Tentunya untuk membangun manusia, dibutuhkan pengakuan dan toleransi terhadap kebudayaan lokal yang ada sehingga mempermudah bagi aktor – aktor dalam melakukan upaya membangun manusia.

Kota Yogyakarta sebagai kota budaya yang memiliki image positif terkait dengan keragaman, inklusifitas, keamanan dan perdamaian yang melekat pada kota ini tentunya tidak dicapai dalam waktu yang singkat. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun citra positif kota Yogyakarta. Keragaman yang ada di kota ini tidak lantas tumbuh begitu saja, tentunya tidak lepas dari dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Sebagai rumah bagi para pekerja seni, kota Yogyakarta memang menyuguhkan beragam kesenian dan kebudayaan yang luar biasa berkualitas.

Masyarakat Yogyakarta tidak akan berkeberatan dengan modernisasi yang melengkapi keberagaman budaya. Akan tetapi, di tengah modernisasi tersebut, Yogyakarta mampu membuktikan jati dirinya sebagai kota budaya yang tetap mempertahankan warisan leluhur yang patut untuk dilestarikan. Beragamnya kebudayaan asing yang masuk tidak lantas membuat kota ini menjadi intoleran dan memandang negatif budaya asing, tetapi justru memperkaya dan memperkuat jati dirinya sebagai kota yang ramah budaya.

Pola pikir seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan berbasis masyarakat. Artinya, justru dengan pengakuan dan penerimaan budaya lokal yang masih dilestarikan, jati diri sebagai manusia seutuhnya dapat dicerminkan dari toleransi dan situasi yang mendukung bagi terciptanya keamanan dan perdamaian. Sifat dan karakter saling menghargai dan menghormati budaya lain merupakan bukti dari kedewasaan masyarakat Yogyakarta.



Pembangunan berbasis masyarakat bukan lantas mengesampingkan pembangunan dari sisi ekonomi akan tetapi justru menggunakan nilai-nilai dan pola pikir masyarakat untuk melakukan suatu perubahan dalam arti positif, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Pada akhirnya pembangunan yang terjadi berdasarkan pada kekuatan masyarakat yang dengan sadar dan berkesinambungan mendorong pembangunan ekonomi secara mikro yang nantinya akan berujung pada pembangunan ekonomi secara makro, tanpa harus memaksakan nilai-nilai dan pola pikir yang bertentangan dengan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut.

Yogyakarta merupakan bukti nyata bahwa kebudayaan lokal mampu berjalan beriringan dengan modernisasi dan konsep pembangunan ekonomi. Sebagai kota wisata, Yogyakarta menawarkan beragam destinasi yang tak kalah bersaing dengan destinasi wisata luar negeri. Terdiri dari beragam varian seperti wisata budaya, wisata kuliner, wisata alam, wisata belanja, wisata hiburan dan lain-lain tentu akan membuat wisatawan banyak berdatangan ke kota ini. Hal ini juga termasuk dalam peningkatan pendapatan ekonomi yang berdampak positif bagi pemerintah maupun masyarakat pelaku industri wisata dan yang terkait.

Selain destinasi wisata dan produk kebudayaan yang menarik minat wisatawan, Yogyakarta dikenal juga dengan keramah-tamahan masyarakatnya, yang menambah daya tarik kota Yogyakarta. Sebagian besar unsur masyarakat sangat menjunjung tinggi budaya yang diinternalisasikan menjadi pola hidup dan dilestarikan hingga saat ini. Dengan demikian sangat dapat dirasakan harmonisasi dan “perkawinan” antara unsur masyarakat dengan kebudayaan baik sebagai pengguna sekaligus pencipta kebudayaan. Ruh budaya yang ada di Yogyakarta justru menjadi penggerak pembangunan manusianya yang berciri khas kearifan lokal tanpa menghentikan proses pembangunan dalam sisi yang lain, bahkan tidak memiliki pertentangan terhadap modernisasi yang ditengarai sebagai unsur yang dapat melunturkan kebudayaan lokal.

Oleh karena itulah maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masyarakat Yogyakarta telah mencapai level keberhasilan pembangunan manusia yang berbasis pada masyarakat. Keberhasilan dalam pembangunan manusia ini kemudian melahirkan image positif yang dikenal hingga ke manca negara. Image positif Yogyakarta sebagai kota yang menghargai kemajemukan, inklusifitas, aman dan damai kemudian mengantarkan Yogyakarta sebagai kota budaya ASEAN *city of culture* untuk tahun 2018-2020. Penetapan Yogyakarta sebagai kota budaya ASEAN tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh unsur yang terlibat dalam proses pembangunan manusia berbasis masyarakat itu sendiri, khususnya pemerintah, lembaga swadaya, kelompok kepentingan dan masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya.

4. KESIMPULAN

Yogyakarta merupakan bukti nyata bahwa kebudayaan lokal mampu berjalan beriringan dengan modernisasi dan konsep pembangunan ekonomi. Pada akhirnya pembangunan yang terjadi berdasarkan pada kekuatan masyarakat yang dengan sadar dan berkesinambungan mendorong pembangunan ekonomi secara mikro yang nantinya akan berujung pada pembangunan ekonomi secara makro, tanpa harus memaksakan nilai-nilai dan pola pikir yang bertentangan dengan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut. Beragamnya kebudayaan asing yang masuk tidak lantas membuat kota ini menjadi intoleran dan memandang negatif budaya asing, tetapi justru memperkaya dan memperkuat jati dirinya sebagai kota yang ramah budaya. Pengakuan dan penerimaan budaya lokal yang masih dilestarikan, jati diri sebagai manusia seutuhnya dapat dicerminkan dari toleransi dan situasi yang mendukung bagi terciptanya keamanan dan perdamaian. Ruh budaya yang ada di Yogyakarta justru menjadi penggerak pembangunan manusianya yang berciri khas kearifan lokal tanpa menghentikan proses pembangunan dalam sisi

yang lain, bahkan tidak memiliki pertentangan terhadap modernisasi yang ditengarai sebagai unsur yang dapat melunturkan kebudayaan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soedjatmoko.1995. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- [2] Kompas, 2018. *Yogyakarta Kota Kebudayaan ASEAN Periode 2018 hingga 2020*. [Online]. Tersedia di <https://travel.kompas.com/read/2018/10/30/104800427/yogyakarta-kota-kebudayaan-asean-periode-2018-hingga-2020/> [diakses pada 2 Maret 2020]
- [3] Nurdien Harry Kistanto. *Tentang Konsep Kebudayaan*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
- [4] Purwowibowo, Hendrijanto, dan Soelistijono. 2018. *Penanda Pakarti*. Yogyakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .
- [5] Harry Hikmat. 2014. *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)*. Kementerian Sosial.
- [6] Humas DIY, 2018. *Yogyakarta Diusulkan Jadi City of Culture Asean*. [Online]. Tersedia di <https://www.jogjaprovo.go.id/berita/detail/yogyakarta-diusulkan-jadi-city-of-culture-asean/> [diakses 5 September 2020]
- [7] JoSS, 2018. *Jogja Jadi Kota Budaya Asean, Ini Alasannya*. [Online]. Tersedia di <https://joss.co.id/2018/05/jogja-jadi-kota-budaya-asean-ini-alasannya/> [diakses 5 September 2020]
- [8] Ani Hasanah, 2018. *Yogyakarta Designated as Asean Cultural City*. [Online]. Tersedia di <https://voicnews.id/index.php/component/k2/item/2899-yogyakarta-designated-as-asean-cultural-city/> [diakses 5 September 2020]
- [9] Humas DIY, 2018. *Semarak, Launching Jogja sebagai City of Culture*. [Online]. Tersedia di <https://jogjaprovo.go.id/berita/detail/yogyakarta-menjadi-kota-budaya-asean-karena-memiliki-toleransi-tinggi/> [diakses 5 September 2020]
- [10] Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Dinas Kebudayaan Propinsi DIY.